

JURNAL KOMUNIKASI

Volume 1, Nomor 2, April 2007

ISSN 1907-848X

Halaman 97 - 188

DAFTAR ISI

Editorial

**Pers dan Teknologi Media:
Dejurnalisasi di Tengah Konvergensi**
Didik Supriyanto - Iwan Awaluddin Yusuf
(97 - 109)

**Citizen Journalism:
Ketika Berita Tidak Hanya Memiliki Satu Muka**
Zaki Habibi
(110 - 120)

Aplikasi Nilai-nilai Jurnalisme Warga pada Radio Komunitas
A. Darmanto
(121 - 132)

**Kegagalan Jurnalisme Profesional
dan Kemunculan Jurnalisme Publik**
Puji Rianto
(133 - 145)

Jurnalisme Publik pada Media Penyiaran Publik
Masduki - Bambang Muryanto
(147 - 154)

Praktik "Jurnalisme Syariah" di Radio MQ FM Yogyakarta
Abdul Rohman
(155 - 162)

Jurnalisme Bencana: Sebuah Tinjauan Etis
Muzayin Nazaruddin
(163 - 177)

Mewaspadaai Praktik Jurnalisme yang Memproduksi Keburukan
Ana Nadhya Abrar
(179 - 188)

Jurnalisme Publik pada Media Penyiaran Publik

Masduki¹ - Bambang Muryanto²

Abstract

Public journalism or civic journalism is a movement that has taken over the last ten years in the USA. Public journalism has emerged along side a revival of interest in civil society and civic participation by improving the quality of news coverage, for example by replacing coverage of political strategy with analysis of substantive issues. In public journalism, public can participate in defining their events. According to Broadcasting Law No. 32/2002, Radio of Republic Indonesia (RRI) and Television of Republic Indonesia (TVRI) has become public broadcasting. As a public broadcasting, the use of public journalism is necessary to move government oriented news to public oriented news in both stations's newsroom. Although, there are some conceptual and technical problems in RRI and TVRI, the successful coverage of Saturday's earthquake, May 27, 2006 in Yogyakarta could be a lesson that have to be learned develop a model of public journalism in both institutions.

Key words:

public, broadcasting, journalism

Pendahuluan

Kabar baik itu datang dari Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Yogyakarta. Setelah selama tiga bulan aktif memberitakan peristiwa gempa bumi di Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya, akhir bulan Juli 2006 pemerintah pusat melalui Departemen Komunikasi dan Informatika memberikan penghargaan khusus kepada Divisi Pemberitaan RRI Yogyakarta sebagai media paling aktif dan cepat dalam pemberitaan pascagempa. Penghargaan ini selain menimbulkan perasaan haru dan bangga bagi insan RRI, juga memberi harapan berkembangnya model jurnalisme publik (*public journalism*) pada media penyiaran publik, baik radio maupun televisi. RRI sebagai radio paling tua di Indonesia diharapkan menjadi contoh bagi radio swasta dan komunitas. Apa itu jurnalisme publik? Bagaimana peluang penerapannya di media penyiaran publik di Indonesia? Tulisan pendek ini mencoba mengelaborasinya.

Jurnalisme Publik

Jurnalisme merupakan sistem teks paling penting (*most important textual system*) di dunia yang mempengaruhi seluruh sentra kehidupan sosial (Hartley, 1996). Jurnalisme seumur dengan modernitas sebagai produk dari dunia Eropa yang sarat dengan eksplorasi ilmu pengetahuan, industrialisasi, dan liberalisasi politik sejak empat abad silam. Jurnalisme adalah disiplin kerja dalam mengumpulkan, menguji sah,

¹ Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.

² Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.

meliput informasi seputar peristiwa aktual, mencakup tren isu sosial, politik, ekonomi, dan aktivitas kemanusiaan (Kovach, 2003). Jurnalisme—dengan demikian—adalah kombinasi antara aspek konseptual dan teknis dalam suatu penyajian informasi kepada masyarakat yang heterogen.

Dalam menjelaskan definisi jurnalisme publik, pakar dan promotor jurnalisme publik di Amerika, Jay Rosen (1997) menyebut beberapa jargon berikut: jurnalisme publik terjadi ketika publik membentuk citra diri mereka sendiri dalam berita (*public participate in defining their dominion*), seni membuat bingkai berita (*the art of framing*), kemampuan mengintegrasikan hak dan kepentingan publik dalam berita (*the capacity to publicly include*), pembentukan narasi berita yang utuh antara pilihan sudut pandang berita dengan sumber-sumber berita (*shaping a master narrative through "news-angle" and sources*). Ibarat seorang dokter, inti tugas dan orientasi jurnalisme publik adalah meningkatkan kesadaran untuk selalu "sehat informasi" (*well-informed*), tidak terbatas hanya menyembuhkan penyakit lupa atau tidak tahu. Mirip dengan jurnalisme damai yang bertujuan menjaga perdamaian, bukan hanya menghentikan peperangan.

Jurnalisme publik awalnya dikenal awal 1990-an dalam praktik liputan pemilihan umum di Amerika Serikat. Dalam proses pemilihan presiden tersebut, sejak pengumpulan suara di negara bagian hingga konvensi nasional, media menyajikan liputan yang tidak bertumpu kepada kerja observasi dan wawancara langsung wartawan yang dirumuskan di ruang redaksi. Media, khususnya koran dan majalah, aktif mengumpulkan pendapat warga kebanyakan serta melibatkan pakar politik dan ekonomi untuk menganalisis berbagai fenomena politik yang terjadi saat itu. Pengumpulan pendapat, *talkshow*, dan antusiasme warga biasa mendapat sorotan yang dominan, menghiasi halaman utama surat kabar, menggeser dominasi liputan yang berpusat pada aktor-aktor politik dan liputan yang berpola *horse race* (siapa menang siapa kalah).

Penerapan jurnalisme publik berkaitan erat dengan prinsip tanggungjawab sosial pers (*social responsibility theory*). Rosen (1997) berpendapat, jurnalisme publik adalah suatu adopsi terhadap pandangan yang lebih luas bagaimana seharusnya wartawan menjalankan misi tanggungjawab sosial di lingkungannya. Wartawan memiliki kuasa yang nyaris sempurna dalam membentuk informasi, sehingga dapat cenderung arogan. Arogansi ini akan berkurang ketika jurnalisme publik dalam proses penentuan isu aktual akan selalu berangkat dari prinsip bagaimana publik memandang isu aktual itu. Sehingga sajian informasi di media akan menimbulkan kepedulian dari publik, bukan hanya sekelompok elit narasumber dari kalangan birokrat atau konglomerat, bahkan termasuk wartawan itu sendiri.

Lebih lengkapnya, Rosen (1997) memaparkan ciri-ciri jurnalisme publik sebagai berikut: (1) Kombinasi antara kemampuan teknis profesional jurnalistik dengan penguasaan terhadap nilai-nilai universal (*the combination of skills and values*); (2) Seni memberikan informasi seputar persoalan kolektif di masyarakat (*the art of telling our collective story*); (3) Secara sadar berorientasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran informasi (*never independent of the country and culture to which the story is sent*); dan

(4) Seni membuat keputusan berdasarkan pertimbangan bagaimana fakta akan dibingkai dan nilai-nilai apa yang akan mendasari struktur berita (*decide how facts will be framed, and that means making decisions about which values will structure the story*).

Bagi wartawan profesional, menyampaikan berita aktual secara rutin setiap hari saja tidak cukup. Ia harus menyertakan tugas lain, yaitu memperbaiki kualitas dan kapasitas kehidupan publik, misalnya dengan melibatkan publik pada setiap proses penentuan topik liputan, proses produksi dan penyajian berita, mendorong publik mampu mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dokter dan wartawan adalah dua profesi yang bertujuan menjalin relasi yang lebih meningkatkan kualitas hidup mereka dan kliennya. Apabila dokter berhubungan dengan kesehatan fisik seperti mengatur menu, nutrisi dan mengurangi stres, maka wartawan berhubungan dengan "kesehatan intelektual dan informasi".

Mats Ekstrom (2004), profesor kajian media dan komunikasi di Universitas Orebro, Swedia, mengatakan, jurnalisme adalah suatu model produksi pengetahuan sekaligus praktik komunikasi yang berkaitan dengan kepentingan dan akseptabilitas publik (*public acceptance of knowledge claims*). Sebagai institusi yang memproduksi ilmu pengetahuan, jurnalisme dan para wartawan aktif dalam mereproduksi realitas, serta bekerja demi memperkuat posisi pengetahuan sebagai bentuk pencerahan pemikiran.

Karakteristik jurnalisme—dengan demikian—adalah aktual, netral, dan selalu bernilai positif bagi masyarakat yang demokratis. Ia menjadi jembatan komunikasi yang setara antara pemerintah dengan masyarakat, antara apa saja yang diinformasikan, siapa saja pemberi informasi, dan kepada siapa informasi itu ditujukan. Dari pengertian ini, Ekstrom dan Rosen memperkenalkan istilah jurnalisme publik yang disebut sebagai jurnalisme emansipatori, yang kemudian dibedakan dengan konsep jurnalisme konvensional. Untuk memperjelas, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Perbedaan Jurnalisme Konvensional dan Jurnalisme Emansipatoris (Publik)

Aspek	Konvensional	Emansipatoris
Fokus berita	Akhir peristiwa	Proses peristiwa
Sumber utama	Pejabat/Aparat	Orang-orang biasa
Gaya penulisan	Faktual	Interpretatif
Legitimasi	Pendekatan ilmiah	Pendekatan lapangan
Model Penyajian	Deskriptif	Eksplanatif

Dalam konsep emansipatoris, sebuah peristiwa disajikan melalui interaksi yang harus dimengerti oleh publik, tidak semata-mata dimengerti wartawan. Sebuah berita akhirnya bermakna dan penting bagi proses pengambilan keputusan publik bukan sekadar sosialisasi agar publik mengetahui sebuah keputusan atau sebuah peristiwa. Intinya, jurnalisme publik mengajak publik untuk peduli dan terlibat sebagai subjek

sehingga dominasi unsur orang biasa sebagai narasumber berita tampak jelas. Bagaimana aplikasi jurnalisme publik di media penyiaran publik di Indonesia dalam tiga tahun terakhir? Bahasan berikut akan menjawabnya.

Media Penyiaran Publik

Secara objektif, radio dan televisi siaran di Indonesia telah menjadi industri komersial dan institusi sosial yang memiliki sejumlah kekuatan dibandingkan media massa lainnya. Kekuatan itu antara lain terlihat dari penetrasinya yang luas, membentang dari pusat kota hingga pelosok pedesaan. Akses terhadap radio dan televisi lebih besar dilakukan masyarakat dibanding media massa lainnya. Tiap keluarga rata-rata memiliki 1 unit radio transistor dan 1 televisi. Pada sisi lain, materi siarannya relatif mudah dicerna. Dalam bahasa yang sederhana, perilaku mendengar dan memirsa lebih universal ketimbang perilaku membaca.

Hampir satu abad radio siaran di Indonesia hadir dalam ruang publik penyiaran sebagai media massa yang secara ekonomis mampu menghidupi jutaan manusia dan melayani kebutuhan sosial dari kawasan kota besar hingga pedalaman pedesaan. Sejak berkembang tahun 1970-an, radio memperkenalkan diri sebagai industri berskala kecil dan menengah yang mengedepankan kepentingan bisnis dalam kurun waktu tertentu dan sarat dengan warna kepentingan sosial-politik pada kurun waktu lain. Televisi, meskipun baru berkembang pesat dipertengahan 1980-an kini telah menjadi media paling dominan membentuk gaya hidup masyarakat.

Barangkali hanya terjadi di Indonesia, radio dan televisi mengalami metamorfosis hingga tiga kali. Reformasi tahun 1998 merubah drastis status kelembagaan dan orientasi operasional RRI dan TVRI. Identitas sebagai stasiun radio dan televisi "plat merah" (*government owned station*) tamat secara yuridis seiring keluarnya UU No. 32/2002 tentang Penyiaran yang menetapkan keduanya sebagai lembaga penyiaran publik. RRI dan TVRI melewati empat era yang menunjukkan kuatnya pengaruh politik dan ekonomi terhadap keduanya (Masduki, 2006).

Era pertama ketika keduanya lahir dan dijadikan alat menyebarluaskan semangat antikolonial pada tahun 1945 hingga 1955. Era ini bertahan hingga konsolidasi rezim Soekarno kuat dan ketika berlaku kebijakan demokrasi terpimpin. RRI dan TVRI menjadi media propaganda politik sejak rezim Soekarno berkuasa penuh dan diteruskan rezim Orde Baru. Era propaganda kekuasaan merupakan antiklimaks dari era pro-kemerdekaan dan berakibat pada merosotnya popularitas RRI sebagai media populis. Pengaruh publik sebagai pemilik jalur frekuensi yang dipergunakan RRI dan TVRI nyaris tidak ada.

Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 memengaruhi status dan orientasi pengelolaan RRI dan TVRI. Dari media yang dikuasai penuh rezim Soeharto menjadi media yang secara politis "mengambang" seiring bubarnya instansi induknya, Departemen Penerangan. Era ketiga ini menempatkan RRI terombang ambing dari media organik yang berpusat pada sistem pemerintahan yang relatif masih otoriter di era Habibie dan Gus Dur menjadi media komersial (*private-owned station*). Posisi publik hampir sama dengan era sebelumnya.

Pilihan RRI untuk menjadi media komersial yang tetap dibiayai pemerintah akhirnya terwujud dalam status perusahaan jawatan (RRI) dan perseroan terbatas (TVRI). Sekali lagi era ini tidak lagi menempatkan posisi publik sebagai subjek di kedua institusi. Baik kekuatan pemerintah maupun pasar komersial terbukti merepresi publik. Ini tercermin dari kuatnya program yang didominasi seremoni pemerintah di satu sisi dan kuatnya program yang mewadahi pengiklan dan pemodal lain yang mampu membayar jam siar untuk promosi.

Perubahan drastis terjadi ketika UU No. 32/2002 tentang Penyiaran disahkan November 2002. UU ini secara tegas menempatkan RRI dan TVRI secara hukum sebagai media penyiaran publik. Lembaga Penyiaran Publik menurut UU ini adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 15 UU 32/2002 juga mengatur sumber pembiayaan RRI dan TVRI berasal dari iuran penyiaran; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sumbangan masyarakat; siaran iklan; dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. UU ini secara politis menempatkan RRI dan TVRI pada posisi netral dan membuka peluang memulihkan citra keduanya yang buruk sebagai corong pemerintah di masa lalu dengan mengadopsi konsep dan praktik jurnalisme publik. Sebuah agenda yang memerlukan komitmen semua pihak.

Aplikasi jurnalisme publik di RRI dan TVRI berkaitan dengan prinsip *diversity of information available to public*, yaitu keragaman informasi yang struktur dan isinya merefleksikan keragaman realitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada kondisi produk informasi yang bias komersial terutama televisi, RRI dan TVRI diharapkan memilih jalur alternatif menjangkau kepentingan khalayak seluas-luasnya. Apabila televisi swasta hanya melayani informasi untuk pasar potensial, maka kehadiran jurnalisme publik di RRI dan TVRI harus bermakna sebagai suatu upaya *extensive reach*, yaitu jurnalisme yang mampu menjangkau luas berbagai khalayak, tidak ada lagi daerah *blankspot in coverages and contents*.

Secara kritis Pierre Bourdieu (2002: 24) menilai berita televisi komersial monoton karena wartawan meliput peristiwa di lokasi yang sama, didorong untuk segera menyajikannya kepada penonton oleh produser, produser didorong oleh kompetisi antartelevisi. Kadangkala *talkshow* penuh debat palsu, menghilangkan analisis yang kompleks dan hanya menyuguhkan esotirisme ilmiah para intelektual. Mereka membuat peristiwa seperti pertandingan olahraga di Olimpiade yang menghibur penonton, bukan membuat terharu. Bourdieu menilai model seleksi informasi yang hanya mengadopsi sensasionalitas dan spektakuleritas menyebabkan televisi terjebak mendramatisasi setiap peristiwa sosial. Televisi menyembunyikan atau mempertunjukkan suatu peristiwa atau korban bukan lagi berdasarkan kategori penting atau tidak penting, kenyataan atau rekayasa.

Penerapan Jurnalisme Publik

Problem praktis penerapan jurnalisme publik di Indonesia, khususnya pada RRI dan TVRI meliputi empat aspek. *Pertama*, pemahaman yang belum utuh terhadap jurnalisme publik itu sendiri. Meski bukan sesuatu yang baru, tetapi jurnalisme publik di Indonesia masih belum dikenal dan diadopsi dalam rutinitas praktik pemberitaan. Jurnalisme publik baru menjadi wacana di kelas pendidikan komunikasi dan pelatihan SDM media siaran. Kekeliruan pemahaman dapat terjadi karena jurnalisme publik merupakan jargon yang tidak normatif, tetapi melekat pada praktik. SDM RRI dan TVRI kurang lebih 15 ribu. Misalnya untuk RRI saja sekitar 7 ribu. Kondisi ini tentu akan menjadi beban dalam sosialisasi ketrampilan jurnalisme publik.

Kedua, kebijakan struktural di RRI-TVRI yang tidak sepenuhnya menopang penerapan jurnalisme publik. Kebijakan ke arah RRI dan TVRI menjadi media yang mandiri secara finansial menimbulkan sikap yang pro-kontra antara membolehkan dan melarang kedua media menyiarkan iklan. Muncul kekhawatiran absennya dukungan dana negara menyebabkan transisi kedua lembaga menuju media publik tidak berjalan mulus. Minimnya tanggungjawab negara selaku pengelola dana publik dalam menghidupi RRI-TVRI akan semakin memperburuk situasi internal yang sudah parah. Dana operasional yang diperlukan untuk menjadi media publik sekitar 400 miliar pertahun, sedangkan yang bisa ditanggung APBN/APBD hanya sekitar 100 miliar pertahun. Kebijakan untuk membolehkan RRI-TVRI menyiarkan iklan komersial secara terbatas dapat menghambat implementasi jurnalisme publik.

Ketiga, masih kuatnya budaya paternalistik di tubuh birokrasi RRI dan TVRI. Sebagai media yang nyaris seumur hidup dikendalikan oleh rezim politik yang berkuasa, geliat baru RRI-TVRI masih tampak riuh. Pada aspek produksi berita, budaya ini menimbulkan bias isi berita. *Pertama, bad news bias*: klasifikasi berita berdasarkan moralitas hitam putih, baik buruk menurut pandangan kelompok dominan khususnya pemerintah. *Kedua, status quo bias*: penguasaan siaran jurnalistik oleh kelompok dominan di masyarakat secara ekonomi dan politik, berita yang dimuat relatif menjaga keamanan mereka. Budaya hirarkis antara wartawan yang notabene bawahan dengan pimpinan stasiun, budaya komunikasi politik yang buruk antara pejabat tertinggi di pusat dengan kepala stasiun RRI/TVRI daerah menjadi hambatan psikologis.

Keempat, popularitas RRI dan TVRI sebagai media penyiaran publik. Selain menghadapi problem keterbatasan alokasi frekuensi, RRI dan TVRI sudah terlanjur bercitra buruk sebagai media dengan menu siaran yang monoton. Dalam dunia penyiaran, frekuensi adalah modal terpenting yang menentukan ada tidaknya sebuah stasiun radio dan televisi. Tanpa gelombang elektromagnetik yang melintas di udara tersebut, aktifitas komunikasi lebih bersifat individual, *off-air* dan terbatas. Jumlah kanal frekuensi yang dimiliki RRI dan TVRI selaku media publik masih kalah jauh dengan televisi dan radio swasta.

Pada aspek menu siaran, khususnya pola kemasan dan strategi penyiaran berita yang berperspektif publik, RRI dan TVRI juga masih menghadapi kendala. Dalam penentuan topik-topik berita, redaksi TVRI dan RRI masih mengandalkan kemampuan analisis internal dan keputusan *newsroom* tanpa menggalang aspirasi pemirsa atau

pendengar aktifnya. Dalam banyak peristiwa yang terkait isu-isu publik, reporter TVRI dan RRI cenderung pasif, menunggu undangan atau permintaan peliputan dari pihak terkait. Selain tidak terbuka, proses produksi dan penyajian berita juga didominasi oleh sumber-sumber aparat dan kelompok elit lainnya.

Dalam peristiwa gempa tektonik berkekuatan 5,9 skala richter yang mengguncang Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 lalu, Tim Pemantau Media Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta melaporkan, secara kuantitatif liputan RRI Yogya untuk persoalan bencana gempa bumi lebih besar daripada TVRI Yogya. Liputan RRI juga lebih beragam dan dapat menunjukkan kondisi nyata di lapangan. Pada tahap darurat, berita RRI menjadi panduan (*guidance*) menyalurkan bantuan kepada warga korban bencana. Bencana dengan skala besar memerlukan armada reporter yang cukup besar. Armada yang dimiliki RRI dan TVRI Yogya sebetulnya relatif sama, namun jika diamati, liputan TVRI cenderung normatif dan mengambil objek liputan peristiwa seremonial.

Terlepas dari persoalan kekurangan SDM, 'langgam' liputan TVRI tampak kurang mendalam dan beragam. Liputan TVRI Yogyakarta soal gempa kurang detail dan *angle*-nya kurang variatif. Selain tidak mendapatkan informasi yang berguna langsung bagi nasib mereka, masyarakat di pedesaan paskagempa juga sulit mengakses informasi. Putusnya sambungan listrik menyebabkan televisi tidak dapat dihidupkan. Selain itu, sebagian televisi juga hancur tertimpa bangunan rumah. Kebanyakan warga juga berhenti berlangganan koran karena uang untuk membeli koran lebih dipilih untuk membiayai kebutuhan sehari-hari yang berat akibat bencana. Praktis, radio menjadi alternatif hingga masa pemulihan paskabencana. Momentum ini ternyata cukup mampu ditangkap insan RRI Yogya, meskipun pada tahap-tahap rekonstruksi, RRI seperti kembali kepada kebiasaan semula: seremonial.

Penutup

UU No. 32/2002 tentang Penyiaran menggeser eksistensi RRI dan TVRI sebagai perintis dari media agen propaganda pemerintah menjadi sebuah media publik (*public service broadcasting*) yang independen. Secara legal formal, radio dan televisi di Indonesia boleh dikatakan mengalami proses pergeseran yang signifikan mengikuti tuntutan serupa atas semua lembaga penyiaran di tingkat internasional dan tuntutan khalayak radio itu sendiri yang makin kritis dan aktif. Status ini *de-facto* tidak serta merta menemui jalan lempang untuk diwujudkan.

Masa-masa antara tahun 2002 sampai 2008 merupakan transisi adaptasi terhadap model kelembagaan baru tersebut, sehingga semua pihak harus ikut mengawalinya dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks penerapan jurnalisme publik, liputan dan program *talkshow* interaktif peristiwa gempa di RRI dan TVRI Yogya merupakan momentum untuk pengembangan jurnalisme publik yang standard. RRI dan TVRI dapat mengukir sejarah dan memori kolektif khalayak sebagai media yang konsisten memberitakan peristiwa publik, antara lain menjadi anjing penjaga (*watch dog*) yang mengawal penyelewengan yang sangat mungkin terjadi pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, misalnya "rekayasa persetujuan" warga melalui gotong

royong dan pertemuan struktural di lapis bawah yang diinisiasi aparat, pemotongan bantuan rekonstruksi (uang atau barang), dan berbagai penyelewengan lainnya. Pada isu lain, kesepakatan antara warga korban dengan aparat kerap kali dibuat dalam kondisi tak seimbang, korban perlu bantuan mendesak dan aparat sibuk mengkalkulasi. Siapakah insan RRI dan TVRI merespon?

Daftar Pustaka

- Bourdieu, Pierre. 2002. *Jurnalistik Di Televisi* (Terjemahan). Yogyakarta: Yayasan Kalamakara-AKINDO.
- Ekstrom, Mats. 2004. *Epistemologies of TV Journalism, A Theoretical Framework*. Sweden: University of Orebro.
- Hartley, John. 1996. *Popular Reality, Journalism, Modernity, Popular Culture*. New York: Martins's Press.
- Kovach, Bill. 2003. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: PANTAU.
- Masduki. "Selamat Datang Generasi Keempat RRI". *Kompas* (Edisi Yogyakarta), Oktober 2006
- Rosen, Jay. 1997. "Public Journalism and Democracy". <http://www.newschool.edu/centers/ecep/rosen.htm>
- UU No. 32/2002 tentang Penyiaran.